

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	5
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

KPU Kembalikan Sisa Anggaran Rp 365 Miliar

○ Pilkada Jakarta Selesai 1 Putaran

JAKARTA (Poskota) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana sisa anggaran Pilkada 2024. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengatakan sisa dana sekitar Rp 360 miliar itu akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jakarta setelah Pilkada 2024 berjalan satu putaran saja.

“Angkanya antara Rp355 miliar sampai Rp365 miliar. Ini perlu saya pastikan lagi ke kesekretariatan tapi yang jelas lebih dari Rp300 miliar,” kata Wahyu, Sabtu (11/1).

Menurut Wahyu, saat ini KPU Jakarta sedang merampungkan sejumlah laporan pelaksanaan Pilkada Jakarta. Setelah laporan dan evaluasi rampung, kata dia, maka dana sisa dari Pilkada Jakarta akan segera dikembalikan kepada Pemprov Jakarta.

Wahyu mengatakan estimasi proses tersebut sekitar tiga bulan. “Sekitar tiga bulan, terhitung dari penetapan gubernur terpilih atau pelantikan nanti. Kalau dari penetapan, berarti estimasi dana akan dikembalikan di April,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Komisioner KPUD Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan rincian biaya yang terpakai untuk pelaksanaan Pilkada Jakarta satu putaran KPU menghabiskan biaya Rp 600 miliar. Anggaran Pilkada 2024 Jakarta diketahui Rp 975 miliar.

“Karena putaran kedua tidak dilaksanakan jadi kami kembalikan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi total anggaran untuk putaran pertama ini sekitar Rp 600 miliar. Kalau dibagi Rp 8 juta pemilih di DKI Jakarta itu biaya penyelenggaraan pilkada itu hanya Rp 75.000 per pemilih,” kata Doddy.

“Jadi Rp 75.000 ini selama 5 tahun kita berikan mereka hak untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin. Kalau dibagi 5 tahun kan 1 tahun Rp 15.000 gitu kan. Jadi ini sebenarnya kalau menjawab terkait dengan mahalnya biaya ini apa? Sebenarnya biaya demokrasi kita ini relatif ya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyebutkan sisa anggaran Rp 365 miliar tersebut akan

menjadi SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Sisa biaya pilkada tersebut akan dimasukkan dalam penggunaan APBD berikutnya.

“Iya, ini kan jadi SILPA. SILPA nanti kita akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya. Jadi dana yang akan digunakan pada APBD berikutnya,” tutur Khoirudin.

Pelantikan Gubernur

Terkini, KPU Jakarta telah menyerahkan hasil rapat pleno penetapan penetapan gubernur dan wakil gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Wahyu Dinata mengatakan berkas tersebut akan segera diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto. “DPRD akan meneruskan ke presiden melalui Kementerian Dalam Negeri,” kata Wahyu.

Wahyu menyerahkan hasil penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Ketua DPRD Jakarta Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano dan Basri Baco pada Jumat (10/1) malam WIB. Selain itu, Wahyu mengatakan pelantikan Pramono



Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata.

IG @kpu_dki

Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta dijadwalkan dilaksanakan pada 7 Februari 2025.

Rencana pelantikan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 mengenai tata cara pelantikan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

“Di Perpres 80 pelantikan terjadwal 7 Februari tahun 2025. Kita tunggu saja pengumuman di pemerintah pusat tentang Perpres 80 ada perubahan atau tidak ya,” katanya. **(ham)**